

EFEKTIVITAS PIDANA BERSYARAT TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S u r a k a r t a**

Oleh :

OKI ADRIAN NUGROHO

NIM. C. 100 020 256

NIRM. 02.6.106.01000.5.0256

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
S U R A K A R T A
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana bersyarat merupakan suatu sistem Pidana di dalam Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum Pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan Pidana atau nestapa kepada pelanggar-pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundangan Pusat maupun Peraturan-peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana.

Di dalam pasal 14 a KUHP dimuat wewenang hakim untuk memberikan putusan Pidana bersyarat dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara, dan dimuat syarat umum pula yaitu terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang dipidana selama masa percobaan. Dan syarat khusus, yaitu terpidana harus mengganti kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan Pidana tersebut. Syarat-syarat tersebut di atas, atau syarat khusus lainnya tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama maupun kemerdekaan berpolitik bagi terpidana.

Secara umum dapat dikatakan bahwa :

”Pidana bersyarat adalah suatu sistem pidana, di mana terhadap pidana dijatuhi pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila dalam masa percobaan yang dilakukan suatu pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan”.¹

Maksud daripada Pidana bersyarat ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan, memperbaiki diri untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana lagi.

Namun, di dalam praktek Pidana bersyarat ini oleh terpidana sering ditafsirkan atau dianggap sebagai bukan Pidana, karena secara fisik tidak membawa pengaruh apapun terhadap terpidana. Oleh karena itu bagi terpidana sering pula dianggap sebagai pembebasan Pidana. Hal tersebut diuraikan oleh Sampurno Djodiharjo yang mengatakan bahwa :

“Lembaga Pidana Bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali (*first offender*) demi mencegah adanya pengaruh dari lingkungan masyarakat narapidana (*inmate society*) sebaiknya terhadap terpidana tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara”.²

Anggapan seperti ini dapat dimengerti, karena syarat-syarat yang ditentukan dalam Pidana bersyarat tidak sulit untuk dilaksanakan, serta kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan Pidana bersyarat ini menimbulkan efek yang negative, misalnya rasa tidak puas dari si korban dan keluarganya, juga pandangan dari anggota masyarakat yang awam

¹ Sampurno Djodiharjo, 1970, *Majalah Pembinaan Hukum Nasional*, No. VIII, tahun, hlm. 64.

² Ibid, hlm. 66.

akan hukum, bahwa setiap pelaku kejahatan semestinya dimasukkan ke dalam penjara sebagai balasan akan perbuatannya, tetapi dalam hal ini justru dipidana di luar tembok penjara.

Meskipun demikian, di sisi lain masyarakat seakan-akan tidak mau mengerti, bahwa penjahat-penjahat yang tidak mereka inginkan itu setelah keluar dari menjalani pidana di tembok penjara tidak menjadi jera, tetapi cenderung untuk berbuat jahat lagi.

Hal ini terjadi karena masyarakat masih menganggap bahwa pidana itu diartikan atau diidentikkan sebagai suatu pembalasan atau sanksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Berdasarkan alasan-alasan dan pandangan pemidanaan bersyarat tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah bentuk-bentuk pemidanaan apa yang dapat mendukung pelaksanaan Pidana Bersyarat secara efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki oleh sistem pemidanaan Indonesia. Bentuk pemidanaan tersebut haruslah meliputi pembinaan pribadi dan kehidupan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pidana bersyarat, sebagai bahan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk itu dalam penelitian ini penulis memberikan judul : “Efektifitas Pidana Bersyarat Terhadap Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat ruang lingkup dalam penelitian ini, sangat luas, maka penulis tidak mungkin untuk menguraikan secara keseluruhan. Untuk itu penulis akan membatasi permasalahan yang berhubungan dengan Efektivitas Penerapan Pidana Bersyarat di Surakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Surakarta ?
2. Bagaimana penerapan Pidana bersyarat yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta ?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pidana bersyarat terhadap tujuan pemidanaan di Pengadilan Negeri Surakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah dirumuskan secara deklaratif dan merupakan penyertaan-penyertaan tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian.³

Dalam pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :

³ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta : UI Press, hlm. 9.

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Pidana bersyarat yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. Untuk mengetahui penerapan Pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Surakarta.
- c. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pidana bersyarat terhadap tujuan pemidanaan di Pengadilan Negeri Surakarta..

2. Tujuan Subyektif

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penerapan teori hukum dengan kehidupan yang nyata di masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum.
- c. Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada

kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.⁴

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan tambahan wacana kepustakaan dan dapat sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan pidana bersyarat.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan mengenai pelaksanaan hukum yang berlaku di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk

⁴ Nawawi Hadari & H.M. Martini, 1995, *Instrumen Pendekatan Sosial \, Suatu Pendekatan Proposal*, , Yogyakarta, UGM Press, hlm. 25

⁵ Soenaryo, 1990, *Metodologi Riset*, Surakarta, UNS Press, hlm. 26.

memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan jalan mengumpulkan data dan kemudian menyusun atau mengkalsifikasikan untuk kemudian diperoleh suatu hasil.⁶

Manfaat menggunakan penelitian deskripsi ini adalah :

- a. Dapat mengetahui masalah sebenarnya dan dapat dengan mudah membuktikan kebenarannya.
- b. Dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang berlaku sekaran ini atau bersifat aktual.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian sosiologis empiris, sebab penelitian ini membahas tentang fenomena atau gejala atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, yaitu tentang efektivitas pelaksanaan pidana bersyarat. Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁷

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Surakarta pernah terjadi

⁶ Ibid, hlm. 27.

⁷ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian HUKUM*, UI Press, hlm. 3.

beberapa putusan yang berupa pidana bersyarat. Hal ini dengan sendirinya memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian mengenai masalah tersebut.

4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, atau data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Data primer yang dimaksudkan berupa hasil wawancara antara penulis dengan hakim, pengawas dan penasehat Pengadilan Negeri Surakarta, serta beberapa nara pidana bersyarat.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan yang berupa sejumlah keterangan yang didapat dari studi kepustakaan, artikel, dokumen, buku-buku literatur, data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Wawancara merupakan komunikasi yang bersifat langsung, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari obyek penelitian, baik seara lisan maupun tertulis.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dipergunakan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mencari dan mempelajari bekas perkara konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.⁸

6. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambila sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probabily sampling. Di mana probability sampling adalah tidak semua untuk setiap unit atau manusia dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur sampel, maksudnya dalam penetapan respondennya tidak dilandasi pemikiran bahwa responden harus mewakili terhadap populasinya, melainkan bahwa

⁸ Khudzaifah Dimyati, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, SUrakarta : Fakultas Hukum UMS, hlm. 57.

mereka harus mengetahui permasalahannya dan dapat memberikan informasi yang diperlukan dan dibutuhkan detailnya data yang diberikan oleh responden jenis ini yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel tidak dengan acak tetapi dengan pertimbangan tertentu yang diselaraskan dengan tujuan penelitian.

7. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi bentuk laporan. Untuk analisa data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan analisa data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analisa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga pelakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka rancangan kerangka penulisan hukum ini terdiri dari empat bab.

Pada bab I yang merupakan pendahuluan dari penulisan hukum ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

⁹ H.B. Sutopo, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press, hlm. 34-36.

Pada bab II merupakan bagian tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi tentang paparan mengenai landasan teori yang relevan dengan penulisan hukum ini dan kerangka pemikiran dari penulisan hukum ini.

Pada bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dimana pada bab ini dipaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

Pada bab IV, yang merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini merupakan penutup dari penulisan hukum ini, akan dipaparkan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini.